

***Sabulungan* dalam Tegangan Identitas Budaya: Kajian Religi Orang Mentawai di Siberut Selatan**

Kornelius Glossanto

Kongregasi Serikat Xaverian, Jakarta, Indonesia

E-mail: glossanto.kornelius@gmail.com

Abstrak

Berbicara mengenai budaya orang Mentawai tidak bisa dilepaskan dari telaah mengenai *sabulungan*. Kepercayaan lokal Mentawai yang mengakui keberadaan dan pengaruh roh-roh alam tersebut sering kali dilukiskan sebagai landasan keselarasan manusia dan lingkungannya. Pada tahun 1954, peristiwa Rapat Tiga Agama menjadi sarana legitimasi tindakan pelarangan *sabulungan*. Hal tersebut dilatarbelakangi upaya negara ‘mendisiplinkan’ agama di Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dominasi yang diwarnai tindak diskriminasi dan kekerasan itu memunculkan konflik ideologi antara negara dan orang Mentawai di Siberut. Tesis ini berisikan ulasan mengenai bagaimana dominasi negara atas sebuah kepercayaan lokal di Siberut memicu timbulnya perlawanan terselubung dari orang Mentawai yang berusaha menjaga identitas budaya mereka. Model perlawanan tersebut, menurut kajian James C. Scott, merupakan ‘senjata orang-orang yang kalah’ menghadapi kelas yang mendominasi kehidupan mereka. Ritual-ritual tradisi *sabulungan* ditampilkan kembali sebagai ekspresi budaya sambil menghidupi keberagamaan sesuai anjuran dan tuntutan pemerintah. Upaya revitalisasi budaya melalui semangat inkulturatif yang ditawarkan Gereja Katolik dan penyadaran nilai-nilai budaya melalui pendidikan berjalan, namun bukan tanpa halangan. Makin lunturnya penghayatan akan *sabulungan* dan nilai budaya di dalamnya serta perubahan gaya hidup modern menunjukkan gegar budaya dan ambivalensi yang dialami orang Mentawai di Siberut dewasa ini.

Kata kunci: *sabulungan*, perlawanan sehari-hari, identitas budaya, Mentawai.

Pendahuluan

Sebagai anggota sebuah kongregasi religius misioner dalam Gereja Katolik, selama masa pendidikan periode tahun 2012–2014, saya berkarya di sebuah paroki di Siberut. Daerah Siberut merupakan satu dari empat pulau utama—dan juga pulau terbesar—di wilayah Kepulauan Mentawai. Pada tahun 1999 wilayah kepulauan ini berdiri secara otonom—memisahkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman. Si-

berut menjadi sebuah kabupaten (Kab. Kepulauan Mentawai) dengan ibu kota Tuapeijat dan menjadi salah satu dari 12 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduk di kepulauan ini dikenal sebagai suku Mentawai dan hidup berdampingan dengan para pendatang yang berasal dari suku Minangkabau, Nias, Batak, Jawa dan Flores.

Agama-agama samawi telah dikenal di hampir seluruh wilayah ke-

pulauan itu. Suku Mentawai memiliki kepercayaan tradisional yang dikenal dengan istilah *sabulungan*. *Sabulungan* berasal dari dua kata *sa* = bentuk plural dari sebuah kesatuan dan *bulu* = persembahan. Kata *sabulungan* sendiri merujuk pada kumpulan roh, sehingga tradisi *sabulungan* mengandung unsur keyakinan akan roh-roh yang dihormati dengan berbagai ritual persembahan¹.

Selama bertugas di Siberut, penulis mengamati sebagian orang masih mempercayai bahwa sakit tertentu bisa jadi disebabkan oleh perjumpaan antar-roh (*simagre*). Oleh karena itu, alih-alih pergi berobat ke puskesmas, mereka memilih memanggil *sikerei* (tabib tradisional) untuk mengobati orang yang mengalami sakit tertentu. Padahal di kota kecamatan di Muara Siberut, telah berdiri Puskesmas dan Poliklinik yang dikelola oleh para suster ALI (Assistenti Laiche Internazionali)². Peristiwa ini menarik bagi penulis, mengingat mayoritas masyarakat Siberut telah menganut agama Katolik

(83,49%) dan Protestan (14,39%).³ Masih dilibatkannya *sikerei* dalam pengobatan tidak terlepas dari tradisi *sabulungan* yang memercayai bahwa munculnya penyakit berasal dari pengaruh kekuatan supranatural.

Banyak dari orang Mentawai di Siberut yang kendati telah menganut salah satu agama resmi yang ada di sana, seperti Katolik, Protestan maupun Islam, dalam keseharian tetap memegang pantangan-pantangan atau menjalankan ritual-ritual yang dilatarbelakangi oleh tradisi *sabulungan*⁴. Namun, tidak sedikit juga orang Mentawai yang sudah tidak mengenal lagi *sabulungan* sebagai sesuatu yang berkaitan dengan identitas budaya mereka. Sejarah masa lalu di mana *sabulungan* dilarang oleh pemerintah, perubahan gaya hidup, dan pembangunan daerah, menjadikan generasi muda orang Mentawai mulai tercabut dari akar religiusitasnya sendiri. Fenomena inilah yang menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam. Bagaimana masyarakat Mentawai di P. Siberut bersiasat untuk menjaga nilai-nilai religi budaya yang terkandung dalam *sabulungan* berhadapan dengan dominasi negara, pewarta agama, serta masuknya budaya modern.

1 Juniator Tulus, "Family Stories Oral Tradition: memories of the past, and contemporary conflicts over land in Mentawai – Indonesia," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 15, no. 1 (1 April 2013): 69, <https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.110>.

2 ALI atau juga dikenal Institut Sekuler "Mater Amabilis" berdiri pada 11 Oktober 1952 di Milan, Italia. Permohonan Prefek Apostolik Padang, Mgr. Pasquale de Martino, atas tenaga biarawati yang berkarya di bidang medis menjadi latar belakang pembentukan institut tersebut.

3 Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik.

4 Tulus, "Family Stories Oral Tradition," 69.

Sabulungan dan Pengaruh dari Luar

Beberapa penelitian mengenai kebudayaan suku Mentawai yang berbicara mengenai sistem kepercayaan tradisional masyarakat Mentawai antara lain terdapat pada tulisan Edwin M. Loeb⁵. Ia menulis mengenai kunjungannya ke wilayah Kepulauan Mentawai pada tahun 1926 dan termasuk antropolog awal yang mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai budaya Mentawai. Tulisan Loeb fokus pada struktur sosial masyarakat suku Mentawai termasuk juga mengenai sistem kepercayaan mereka, meskipun ia belum menggunakan istilah arat *sabulungan*. Istilah arat *sabulungan* baru digunakan secara umum pada tahun 1950-an, pasca-kemerdekaan Indonesia. Menurut Juniator, istilah itu muncul dari pemerintah dan para misionaris awal (kemungkinan besar Protestan yang masuk ke Mentawai tahun 1900⁶).

Mengenai sistem religi suku Mentawai, Loeb melihat adanya kemiripan dengan pengaruh Hinduisme dalam ritual pengorbanan ayam dan babi, cara penyampaian ramalan—terutama dalam praktik hepatoscopy atau upacara menyampaikan ramalan dengan mengamati bagian organ hati dari binatang, seperti ayam atau burung. Namun, pe-

ngaruh Hinduisme tidak dijumpai dalam kisah-kisah dan mitos-mitos tradisional masyarakat Mentawai. Ia justru menuliskan bahwa masyarakat Mentawai meyakini adanya roh alam, jiwa, dan hantu. Roh alam diyakini masyarakat setempat bukan sebagai sebuah entitas tunggal. Roh-roh yang berdiam di langit disebut *tai-ka-manua* (Bhs. Mentawai: orang-orang di langit), mereka yang menghuni lautan dinamakan *tai-ka-baga-koat* (Bhs. Mentawai: orang-orang di dalam laut), mereka yang tinggal di hutan dikenal sebagai *tai-ka-leleu* (Bhs. Mentawai: orang-orang di gunung), dan roh-roh yang berada di tanah disebut *tai-ka-baga-polak* (Bhs. Mentawai: orang-orang di dalam bumi). Tidak ada sebutan personal bagi roh-roh alam tersebut. Dan istilah-istilah itu tidak mendefinisikan bahwa ada roh alam yang lebih tinggi dari roh-roh alam yang lain. Loeb juga mengemukakan pendapat bahwa agama tradisional suku Mentawai tersebut memiliki kemiripan dengan agama-agama tradisional lain di Indonesia di mana masih mengandung konsep relasi manusia dan roh.

Reimar Schefold⁷ berpendapat bahwa roh-roh yang diam di alam adalah perwujudan dari konsep tradisional masyarakat Mentawai mengenai Tuhan yang Mahaesa, atau mereka kenal

5 Edwin Meyer Loeb, "Mentawai Religious Cult," dalam *University of California Publications in American Archaeology and Ethnology*, vol. 25, no. 2 (Berkeley, Calif.: University of California, 1929), 408–33.

6 Tulus, "Family Stories Oral Tradition," 68.

7 Reimar Schefold, "The Domestication of Culture: Nation-building and Ethnic Diversity in Indonesia," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 154, no. 2 (1998): 20.

dengan istilah *ulau kina* (Bhs. Mentawai: Anda yang terang). Seluruh roh yang ada di langit, gunung, dan hutan saling bereaksi dengan jiwa manusia dan jiwa-jiwa yang dimiliki binatang, tumbuhan, dan semua objek yang ada. Berbeda dengan roh yang bisa hidup bebas tanpa terikat bentuk fisik, jiwa menurut Coronese merupakan duplikat rohani dari semua objek: manusia, pohon, tanaman, hewan bahkan batubatuan. Dengan demikian, jiwa ini terikat dengan tubuh fisik meskipun ia bisa juga mengembara keluar dari tubuh dan berjumpa dengan jiwa-jiwa lain yang ada di alam⁸. Relasi antara roh-roh, jiwa-jiwa, dan dunia manusia harus berlangsung dengan seimbang. Namun, dalam kenyataannya aktivitas manusia selalu saja bisa memengaruhi keseimbangan itu. Munculnya penyakit bisa dipandang sebagai dampak dari relasi jiwa manusia dan jiwa benda-benda di alam yang tidak seimbang. Oleh karena itu, ada begitu banyak upacara, larangan, dan pantangan yang dipegang oleh orang Mentawai dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang bertujuan menjaga relasi mereka dengan dunia roh dan jiwa sehingga tetap seimbang⁹.

Stefano Coronese¹⁰, imam Misionaris Xaverian berkebangsaan Italia,

mencatat bahwa perjumpaan masyarakat suku Mentawai dengan budaya lain lewat perdagangan telah ada pada tahun 1621. Dan sebelum tahun 1600, hanya Pulau Siberut saja yang dianggap berpenghuni. Jhon Crisp, yang datang ke wilayah kepulauan itu pada 1792, membuat catatan yang menjelaskan bahwa mereka yang tinggal di Mentawai—terutama yang mendiami Pulau Pagai—juga telah melakukan hubungan dagang dengan Bengkulu. Hubungan dagang inilah yang menyebabkan Pulau Sipora dan Pulau Sikakap lebih maju jika dibandingkan dengan Pulau Siberut yang dalam waktu lama ditinggalkan terisolir¹¹. Agama-agama pendatang dari luar baru dikenal kemudian.

Protestan masuk ke Mentawai di Sikakap pada tahun 1901 dan banyak pelaut dan pedagang sudah singgah di Sikakap dan Sipora pada masa itu. Juniator¹² merangkum informasi yang menunjukkan bahwa agama Protestan masuk ke wilayah Mentawai melalui para misionaris Jerman yang datang di Pulau Pagai pada 1901 atas undangan pemerintah kolonial Belanda. Coronese mencatat 2 nama pembuka misi Protestantisme di Mentawai, yakni Pdt. August Lett dan rekannya A. Kramer. Kemudian, barulah tiba Pdt. F. Borger yang berkarya cukup lama—lebih dari 20 tahun—di Mentawai. Pasca-Perang Dunia II, kegiatan *zending* Protestan

8 Stefano Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai* (Jakarta: Grafindian, 1986), 42.

9 Schefold, "The Domestication of Culture: Nation-building and Ethnic Diversity in Indonesia," 21.

10 Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, 31.

11 Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, 32.

12 Tulus, "Family Stories Oral Tradition."

makin berkembang di wilayah Selatan kepulauan Mentawai itu. Salah satu buah karya yang dihasilkan *zending* Protestan dalam penyebaran kekristenan di Mentawai adalah diterjemahkannya Kitab Suci ke dalam bahasa Mentawai¹³. Penerjemahan Kitab Suci ke dalam bahasa setempat (dalam hal ini bahasa Mentawai dengan dialek Sikakap) menjadi sumbangan besar dalam misi kekristenan di Mentawai. Bahasa dialek Sikakap kemudian menjadi bahasa resmi dalam tata peribadatan Gereja Protestan dan Katolik hingga saat ini.

Harun Yunus¹⁴ menulis bahwa pada tahun 1935 telah ada penduduk Mentawai yang menganut agama Islam di Pulau Siberut. Pada saat itu, seorang anak Siberut bernama Maruaian dari Simalegi diadopsi oleh seorang opas polisi bernama Umar Said. Orang Mentawai asli pertama yang memeluk agama Islam adalah Kilaek Sakerebau. Namun, karena tidak ditemukannya sumber tertulis, sulit diketahui dengan persis kapan tepatnya agama Islam masuk ke wilayah Kep. Mentawai. Walau demikian, perjumpaan orang Mentawai dengan para pedagang dari tanah tepi Sumatera Barat yang beragama Islam telah terjalin jauh sebelum kehadiran Belanda. Para pedagang itu da-

tang ke Mentawai untuk membeli daun nipah, rotan, dari masyarakat setempat dengan sistem barter. Pada tahun 1950, para pedagang Minangkabau masuk ke Pulau Siberut bagian utara. Sambil berdagang, mereka perlahan-lahan mengajak orang Mentawai untuk memeluk agama Islam. Pengaruh Islam di Mentawai semakin berkembang dengan masuknya para perantau dari daerah Pariaman dan Jawa. Para perantau ini kemudian tinggal dan menetap di Mentawai dengan mengambil penduduk setempat sebagai pasangan hidup mereka¹⁵.

Misi Katolik masuk ke Mentawai, tepatnya di Siberut Selatan, melalui para misionaris Xaverian. Saat itu tahun 1953, Pastor Aurelio Canizzaro, SX mengunjungi Pulau Siberut, Sikabalan, Sikakap, dan Sipora, atas perintah dari Mgr. De Martino di Padang. Barulah pada 18 Desember 1954, P. Canizzaro bersama dengan P. Angelo Calvi, SX, dengan menumpang kapal Bendalu, berlayar menuju Siberut dan menetap di sana. Pada tahun itu pula, berdirilah gereja Katolik pertama di Mentawai. Natal tahun 1954 juga menjadi tonggak lahirnya gereja Katolik di Mentawai dengan dipermandikannya 10 orang di gereja Siberut. Misi Katolik di Mentawai dimulai dengan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hadirnya agama Katolik dengan

13 Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, 28.

14 Gerard Persoon dan Reimar Schefold, ed., *Pulau Siberut: pembangunan sosio-ekonomi, kebudayaan tradisional dan lingkungan hidup* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985).

15 Persoon dan Schefold, *Pulau Siberut*, 116–17.

inkulturasinya menghadirkan suasana yang bertolak belakang dengan situasi pasca pelarangan *sabulungan* di Mentawai, khususnya di Siberut. Para misionaris awal berusaha mengenal dan mempelajari budaya lokal serta memberikan penghargaan atasnya. Melihat sikap para misionaris tersebut yang tidak membakar alat-alat *kerei* dan melarang mengadakan upacara-upacara adat, banyak orang Mentawai di Siberut bersedia menjadi Katolik.

Marginalisasi *Sabulungan*

Pasca-kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, wilayah Kepulauan Mentawai praktis secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kepulauan Mentawai yang jauh dari pusat pemerintahan di Padang, apalagi di Jakarta, menjadikan perkembangan wilayah tersebut terabaikan. Ditambah lagi pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1950-an, pemerintah pusat masih harus menghadapi berbagai persoalan dalam upaya menstabilkan pemerintahan yang baru saja terbentuk. Peristiwa-peristiwa seperti Agresi Militer Belanda, pembentukan konstitusi, perang sipil, hingga beragam aksi pemberontakan dari dalam negeri menjadi sesuatu yang menyita perhatian besar pemerintahan saat itu.

Situasi itu menjadikan wilayah Kepulauan Mentawai sama terabaikannya dengan keberadaan daerah-daerah terluar Indonesia yang lain. Bahkan

hampir 3 dekade setelah kemerdekaan Indonesia, gubernur Sumatera Barat masih memandang orang Mentawai sebagai masyarakat primitif¹⁶. Keberadaan masyarakat yang dikategorikan sebagai ‘suku terasing’ ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjalankan program ‘penormalan’ sosial sehingga budaya nasional yang modern bisa merata. Tugas ‘pemberadaban nasional’ itu kemudian menjadi tanggung jawab Departemen Sosial. Alasan tersebut menjadi sebuah landasan yang kuat bagi pemerintah untuk menjalankan misi penghilangan ciri-ciri tradisional dan keprimitifan orang Siberut¹⁷.

Pengaruh pemerintah atas masyarakat Mentawai tampak dalam kehadiran aparat polisi, militer, kepala pemerintahan (camat, kepala kampung), guru, hingga para pewarta agama yang masuk ke Siberut selama periode 1950-1960-an. Dalam pandangan Persoon¹⁸, kaki tangan pemerintah di lapangan inilah yang mendorong terbentuknya perkampungan-perkampungan sosial yang menggantikan struktur tertutup *uma* tradisional. Kruyt¹⁹ menyebut

16 Darmanto dan Abidah B. Setyowati, *Berebut Hutan Siberut: orang Mentawai, kekuasaan, dan politik ekologi*, Cet. 1 (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), UNESCO, 2012), 58.

17 Gerard A. Persoon, ed., *The Position of Indigenous Peoples in the Management of Tropical Forests*, Tropenbos Series 23 (Wageningen: Tropenbos International, 2004), 23; seperti dikutip dalam Darmanto dan Setyowati, *Berebut Hutan Siberut*, 58.

18 dalam Darmanto dan Setyowati, *Berebut Hutan Siberut*, 59.

19 dalam Coronese, *Kebudayaan Suku*

uma sebagai rumah suku. Rudito²⁰ menyebutkan bahwa selain merujuk pada bangunan fisik rumah tradisional yang dimiliki sebuah suku, *uma* juga menjadi simbol kekerabatan yang luas disebut *muntogat* (*lineage*; Mentawai: keturunan). Sebelum terbentuknya perkampungan sosial, masyarakat Mentawai hidup di sekitar *uma* suku mereka yang terbatas pada wilayah tertentu saja.

Dalam situasi itu, kepercayaan *sabulungan* dan pola hidup tradisional orang Mentawai di Siberut berhadapan dengan kuasa pemerintah. Menurut banyak cerita dari orang Mentawai di Siberut, *sabulungan* sudah terlebih dahulu hilang di wilayah Sikakap dan Sipora. Namun, penulis tidak banyak mendapat informasi, baik dari perbincangan dengan warga setempat maupun dari literatur mengenai bagaimana hal itu terjadi. Kemungkinan besar lunturnya pengaruh *sabulungan* di wilayah selatan adalah akibat masuknya agama Protestan serta banyaknya pengaruh dari luar di wilayah itu yang sering kali didatangi para pedagang pesisir Sumatera dan para pelaut. Di Seberut, perubahan yang besar terjadi justru setelah tahun 1950-an melalui intervensi negara dengan Rapat Tiga Agama. Pertemuan tersebut—sebagaimana dicatat oleh Coronese²¹, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

Mentawai, 107.

20 Bambang Rudito, *Bebetei Uma Kebangkitan Orang Mentawai : Sebuah Etnografi* (Gading Publishing, 2013), 49.

21 Coronese, *Kebudayaan Suku Mentawai*, 38.

1. Arat *sabulungan* harus dihapuskan, bilamana perlu menggunakan kekerasan dengan bantuan tenaga polisi.
2. Dalam tempo 3 bulan diberi kebebasan kepada penduduk asli untuk memilih salah satu agama, Islam atau Kristen Protestan. Jika sudah berakhir tempo yang diberikan ternyata mereka tidak juga melakukan pilihan, semua alat-alat keagamaan arat *sabulungan* akan dibakar oleh polisi dan bahkan diancam hukuman.

Sabulungan dipandang sebagai bagian dari pola hidup ‘masyarakat primitif’ dan karenanya harus dihilangkan demi program ‘normalisasi’ negara. Rapat Tiga Agama menjadi peristiwa yang sangat jelas bagaimana pemerintah memaksakan pengaruhnya terhadap kebudayaan lokal orang Mentawai. Agama-agama baru ‘dipaksakan’ untuk dianut oleh masyarakat setempat tanpa adanya kesempatan yang cukup panjang untuk mengenal agama-agama tersebut. *Sabulungan* yang melingkupi cara hidup dan cara pandang orang Mentawai terhadap alamnya dilarang. Dalam situasi yang dipenuhi rasa takut akan hukuman dari aparat pemerintah bercampur dengan kebingungan untuk meninggalkan cara hidup yang telah sekian lama dipegang, orang Mentawai di Siberut muncul sebagai saksi bagaimana negara masuk dan memengaruhi kehidupan mereka.

Perlawanan Simbolis dan Siasat Pelestari *Sabulungan*

Bentuk perlawanan para *sikebuk* atas gerakan pelarangan *sabulungan* yang muncul pertama kali adalah dengan melarikan diri dan menghindari. Ketika polisi mencari dan membakar *buluat* dan melarang *sikerei* menjalankan ritual-ritual, sejumlah orang Mentawai yang mendengar atau mengetahui hal tersebut melarikan diri ke desa-desa di hulu sungai. Daerah ini sulit dijangkau oleh polisi. Selain itu, para *sikebuk* yang pada masa mudanya mengalami sendiri perlakuan para polisi yang berupaya memusnahkan atribut budaya mereka, mencoba menyembunyikan atau membuat benda-benda tiruan untuk mengelabui para polisi.

Siasat yang lain tampak dalam sikap patuh orang-orang Mentawai untuk menganut agama yang ditawarkan oleh pemerintah. Jika para penganut Kaharingan di Kalimantan misalnya berusaha memperoleh pengakuan negara dengan jalan mengadakan gerakan struktural dan bernaung pada agama Hindu, orang Mentawai di Siberut justru dengan terbuka memilih menganut salah satu agama yang diakui pemerintah. Di Siberut, sebagian besar orang Mentawai memilih untuk beragama Katolik yang hadir justru di awal program ‘penertiban’ *sabulungan* di tahun 1954. Dengan tradisi inkulturasi Gereja Katolik yang memberi ruang pada ekspresi budaya setempat, orang

Mentawai di Siberut melihat adanya peluang untuk tetap menjaga tradisi *sabulungan*. Siasat ini juga dirasa mampu ‘menyelamatkan’ mereka dari label ‘orang tidak beragama’ yang dengan mudah diasosiasikan sebagai anti Pancasila dan penganut paham komunis.

Setelah tahun 1980-an, sikap pemerintah mulai longgar dan sebagian besar orang Mentawai menganut agama resmi pemerintah, mereka merasa lebih bebas mengekspresikan diri dalam upacara-upacara adat. Agama-agama resmi tidak ditinggalkan dan upacara tradisional yang mereka lakukan diperkenalkan sebagai bagian dari budaya Mentawai. Penggunaan istilah *sabulungan* dihindari dan dipilih istilah budaya sebagai gantinya. Beberapa dari orang Mentawai yang penulis jumpai menyatakan bahwa *sabulungan* adalah agama lama yang sudah ditinggalkan. Sebagian lagi mengatakan itu merupakan agama zaman dulu yang menyembah *sanitu* (setan). Mereka mengasosiasikan *sabulungan* dengan gaya hidup orang yang belum maju dan sudah dihilangkan dengan adanya agama resmi pemerintah dan pembangunan. Namun di beberapa daerah, *sabulungan*—meskipun tetap tidak dinyatakan secara terbuka—masih di jaga keberadaannya.

Upaya revitalisasi budaya tradisional Mentawai mulai muncul. Salah satu contohnya tampak dari perhatian orang-orang yang merasa penting mengajarkan nilai-nilai budaya Men-

tawai melalui pendidikan formal. Selama berada dalam wilayah administratif Padang Pariaman, yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah budaya Minangkabau dengan pelajaran BAM (Budaya Alam Minangkabau). Di Siberut, sekolah milik Yayasan Prayoga, SD St. Maria, pada tahun 1990-an telah mulai mengajarkan budaya Mentawai atau yang kemudian disingkat 'Bumen' secara mandiri dan dimasukkan dalam bahan pengajaran muatan lokal. Hal ini dilakukan agar para peserta didik mengenal budaya Mentawai. Dalam bahan pengajaran Bumen tersebut diperkenalkan mengenai dimensi geografi, sosial, dan budaya Mentawai. Kebijakan ini muncul dari kalangan orang-orang yang peduli terhadap pelestarian nilai-nilai budaya Mentawai. Sebab meskipun merupakan bagian dari wilayah Sumatera Barat yang dominan dengan kebudayaan Minangkabau, orang Mentawai memiliki budayanya sendiri yang perlu juga dipelajari dan dilestarikan.

Kini setelah terbentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dan banyak orang Mentawai yang duduk di pemerintahan, pengajaran muatan lokal Budaya Mentawai (Bumen) di sekolah makin dikembangkan. Saat ini, menurut keterangan yang penulis peroleh dari kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan, Bumen telah menjadi bahan pengajaran wajib bagi siswa-siswa sekolah dasar di seluruh kabupaten. Materi pengajaran

Bumen disusun oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM Yayasan Citra Mandiri (YCM). Inilah yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Mentawai untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya Mentawai. *Sabulungan* sebagai suatu cara hidup tradisional orang Mentawai memang tidak akan muncul lagi seperti masa lalu. Akan tetapi, nilai-nilai budaya lokal yang terkandung di dalamnya diusahakan agar tidak lenyap dan dilupakan.

Selain dalam bidang pendidikan, upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya tampak dalam inkulturasi Gereja Katolik. Hal ini dilakukan sejak awal kehadiran Gereja Katolik di Siberut. Para misionaris awal berusaha mempelajari bahasa, budaya, serta cara hidup orang Mentawai. Bersama para guru agama setempat, para misionaris mengadakan pembinaan tentang inkulturasi dan bagaimana nilai-nilai Kristiani diajarkan menggunakan sarana-sarana budaya. Sebenarnya, upaya ini telah dimulai oleh para *zending* Protestan yang berjasa menyusun Kitab Suci dalam bahasa Mentawai.

Identitas Budaya: Ambivalensi Orang Mentawai

Pada bagian ini penulis menyoroti munculnya ambivalensi dalam menghidupi identitas budaya orang Mentawai. Jika merujuk kembali ke masa lalu, sebelum hadirnya agama-agama resmi di Siberut, *sabulungan* menjadi sebuah cara hidup orang Mentawai.

Dalam tradisi yang telah mengakui kehadiran alam fisik dan sesuatu yang transenden di alam membentuk sebuah pola relasi yang selaras antara manusia dan alamnya. Berbagai ritual, tabu, dan pantangan yang mengatur perilaku manusia terhadap alam, bertujuan untuk menjaga keselarasan tersebut. Tradisi *sabulungan* memberikan gambaran bagaimana manusia melihat alam lingkungannya bukan sebagai milik mereka. Mereka memperoleh segala yang diperlukan dari alam, namun mereka tetap menjaga kesadaran untuk berterima kasih—dengan menjaga hubungan—dengan roh-roh yang ada di alam. Relasi antara manusia dan hutan di Siberut memberikan sumbangan pada pembentukan identitas budaya orang Mentawai.

Seiring perjalanan waktu, dengan masuknya pemerintah dan program pembangunan (agama dan pendidikan), tampak perubahan memengaruhi cara pandang orang Mentawai di Siberut terhadap identitas budayanya. Pola relasi antara manusia dan hutan yang sebelumnya dipenuhi dengan aturan *sabulungan* berganti dengan relasi produksi demi kepentingan ekonomi. Pemanfaatan hasil hutan yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ritual-ritual beralih menjadi upaya memenuhi permintaan pasar. Ladang-ladang baru dibuka untuk menanam coklat dan cengkeh, kayu-kayu dari pohon yang besar ditebang dan dijual, hingga tanah-tanah yang diju-

al kepada para pendatang, memperlihatkan perubahan cara pandang orang Mentawai di Siberut terhadap hutan.

Di satu sisi, masih ada keinginan untuk menjaga tanah-tanah mereka dan menghidupi tradisi nenek moyang, namun di sisi lain mereka melihat bahwa hasil hutan dan penjualan tanah bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar dan cepat. Situasi tersebut makin tampak jelas dengan mulai mudarnya tradisi *sabulungan* dengan segala nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Situasi ambivalensi juga tampak dari upaya menghidupi *sabulungan* itu sendiri. Praktik kepercayaan lokal itu tampak berada di posisi koma, antara hidup dan mati. Hadirnya pembangunan, pendidikan, dan agama mengubah pola kehidupan juga. Tuntutan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah atau di kantor, tidak memungkinkan waktu yang leluasa untuk mengadakan ritual-ritual yang tentu memerlukan persiapan yang panjang. Tuntutan biaya pendidikan anak dan rumah tangga menggeser pula pelaksanaan upacara adat yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Masih ada ketakutan akan ditimpa musibah dan kemalangan jika ritual seperti *eneget*, *pangurei*, dan *panunggru* misalnya tidak dilaksanakan.

Hal yang serupa terjadi dalam kehidupan beragama. Mereka yang telah beragama—misalnya Katolik—di satu sisi mereka merasa telah meninggalkan tradisi *sabulungan*. Mereka hadir

di Gereja pada hari Minggu dan mengadakan upacara-upacara keagamaan. Upacara inisiasi seperti *pangabela*, *pangambok*, dan *abbinen* misalnya, digantikan dengan baptisan bayi di Gereja. Pak Thomas menceritakan bagaimana perubahan itu dialami. Menurutnya tidak semua ritual tersebut dihilangkan. Hanya saja bergantung apakah keluarga yang bersangkutan ingin mengadakannya atau tidak. Akan tetapi, sejumlah keluarga merasa sudah lengkap jika anak mereka sudah dipermandikan. Upacara yang dulu dibuat di sungai agar *simagre* si bayi diperkenalkan dengan lingkungannya dan tumbuh dengan kuat tidak diadakan lagi. Namun di sisi lain, *punen eneget* yang diadakan ketika anak mulai remaja, masih dilaksanakan. Hal ini dibuat agar si anak bisa tumbuh sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Dalam hal ini, tampak bagaimana upaya mereka untuk tidak meninggalkan keduanya, agama dan budaya *sabulungan* tersebut—karena keduanya memiliki tuntutan masing-masing yang harus tetap dipenuhi.

Fenomena dalam dunia pariwisata juga memperlihatkan bagaimana orang Mentawai di Siberut tengah mengalami ambivalensi. Kegiatan-kegiatan seperti membuat tato, mengadakan tarian tradisional (*turuk laggai*), mencari ikan di sungai, dan kehidupan di rumah-rumah ladang dengan busana zaman dulu (menggunakan *kabit* dan segala aksesorisnya bagi laki-laki), menjadi

konsumsi para wisatawan. Kegiatan yang sebenarnya sudah bisa ditinggalkan, karena masyarakat telah hidup di desa-desa dan bekerja di ladang. Namun tetap dipertahankan karena dirasa lebih menguntungkan secara finansial. Masyarakat tersebut telah mengenal teknologi modern: memanfaatkan listrik, menggunakan telepon genggam, dan memiliki kendaraan bermotor. Namun, mereka berusaha tetap memperlihatkan keaslian budaya dengan cara hidup tradisional, karena hal itu juga bisa mendatangkan penghasilan.

Turuk laggai yang dulunya diadakan dalam pesta-pesta tradisional—seperti pernikahan atau pendirian *uma*—sebagai ungkapan syukur dan kebahagiaan, saat ini selalu diadakan dalam acara penyambutan wisatawan, pejabat pemerintahan, atau festival budaya. Penyambutan dengan *turuk laggai* menurut Thomas Tatebburuk dan Mikael Sabbagalet misalnya tidak digunakan sebagai tarian penyambutan seperti pada masa lalu. *Turuk laggai* tersebut akan tampak lebih menarik sebagai pertunjukan jika dilakukan oleh *sikerei* ‘asli’. Mateus Sakukuret yang telah cukup lama berkecimpung dalam kegiatan pariwisata dan sanggar budaya menceritakan bagaimana banyaknya permintaan menampilkan *sikerei* dalam *turuk laggai*. Meskipun tampaknya tarian tersebut telah menjadi komoditi pariwisata, unsur ‘keasliannya’ tetap dipertahankan dengan mengadakan ritual-ritual persiapan

tertentu seperti misalnya ritual *paru-ak*. Ritual ini umumnya dilakukan oleh *sikerei* ketika mendatangi tempat yang baru atau berjumpa dengan *sikerei* dari daerah lain. Jika tidak diadakan ritual tersebut, *sikerei* yang bersangkutan akan mengalami demam, sakit, dan tidak bisa melanjutkan atraksi *turuk lag-gai* yang diharapkan.

Melalui paparan di atas, tampak bagaimana situasi ambivalen yang dialami orang Mentawai di Siberut. Tradisi *sabulungan* yang kemudian direduksi dalam ungkapan ‘budaya’ Mentawai di satu sisi ingin ditampilkan kembali. Namun di sisi lain, terputusnya pengetahuan budaya dari generasi pendahulu akibat rangkaian peristiwa diskriminasi di masa lalu menyebabkan praktik-praktik budaya tersebut dihidupi dengan meraba-raba kembali. Hingga saat ini, upaya menegaskan kembali identitas budaya orang Mentawai terus diwarnai dengan situasi ambivalen dan perubahan yang terus dan sedang terjadi.

Catatan Akhir

Pelarangan *sabulungan* di Pulau Siberut pasca 1954 dengan Rapat Tiga Agama muncul sebagai upaya pemerintah mengatur kehidupan beragama. Kehadiran agama-agama samawi sebagai agama resmi negara ditambah program pembangunan yang dicanangkan untuk membangun identitas tunggal bangsa menjadikan keragaman dan kearifan lokal tersingkir. Fungsi penga-

wasan dan penertiban aliran-aliran kepercayaan yang mengancam stabilitas negara justru menjadi sarana legitimasi untuk memaksa masyarakat Mentawai di Siberut meninggalkan tradisi *sabulungan* yang mengandung nilai-nilai budaya orang Mentawai. Bersamaan dengan itu pula, agama-agama resmi negara dipaksa ditawarkan. Memiliki agama—dan agama tersebut harus merupakan agama yang diakui negara—seolah menjadi tanda masyarakat yang sudah merdeka dan maju. Kepercayaan lokal yang sarat dengan nilai-nilai budaya diposisikan sebagai cara hidup kuno, terbelakang, dan oleh karena itu perlu ditinggalkan dan diganti. Proses pembaruan dan pemberadaban tersebut sayangnya dilakukan dengan unsur kekerasan dan perilaku intimidatif oleh kalangan polisi sebagai representasi negara. Hal itu memunculkan perlawanan dari masyarakat lokal.

Bagi kelompok masyarakat Mentawai di Siberut, melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal hanya akan merugikan mereka. Ancaman hukuman penjara dan kekerasan fisik menjadikan orang Mentawai memilih bentuk perlawanan yang terselubung. Tindakan protes sambil menghindari menjadi satu-satunya senjata perlawanan mereka. Tampak di permukaan bahwa orang Mentawai telah meninggalkan tradisi *sabulungan* dan menganut agama resmi pemerintah seperti Katolik, Protestan, dan Islam. Dengan menganut agama resmi negara, orang

Mentawai terbebas dari stigma sebagai masyarakat penganut animisme yang tertinggal. Namun, sejumlah orang dari generasi tua tidak serta merta melepaskan dan meninggalkan ritual-ritual budaya masa lalu. Tradisi yang berakar dari *sabulungan* ditampilkan kembali sebagai bagian dari budaya Mentawai. Mereka yang telah beragama Katolik mendapat angin segar dengan konsep inkulturasi yang ditawarkan Gereja melalui para misionaris yang datang di bumi Mentawai bertepatan dengan peristiwa pelarangan *sabulungan* tahun 1954. Dengan semangat inkulturatif, ritual-ritual budaya Mentawai muncul dengan bentuknya yang baru beriringan dengan hidup beragama yang tidak secara mentah-mentah ditolak. Setelah berdiri mandiri sebagai daerah yang otonom, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh orang Mentawai. Upaya revitalisasi budaya lokal mulai diperjuangkan melalui pendidikan dengan memasukkan pelajaran Budaya Mentawai (Bumen) dalam kurikulum pendidikan dasar. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda orang Mentawai mengenal nilai-nilai budaya mereka sendiri.

Program pembangunan daerah yang terjadi di Siberut masih terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun tidak ada lagi ancaman untuk mengekspresikan kebebasan melaksanakan tradisi lokal, upaya menghidupkan kembali identitas budaya Mentawai masih tetap mengalami kendala. Trauma peristiwa-

wa pelarangan *sabulungan*, masuknya agama-agama samawi, dan terbukanya wilayah Mentawai akan budaya modern, memperlihatkan gegar budaya dan situasi ambivalensi. Di satu sisi, tradisi budaya masa lalu yang memperlihatkan keselarasan hidup manusia dan alam ingin dipertahankan. Namun di sisi lain, masuknya pengaruh agama-agama dan budaya modern melalui pembangunan dan pendidikan turut andil dalam lunturnya tradisi tersebut. Tuntutan perkembangan zaman dan modernisasi membuat masyarakat Mentawai di Siberut terus melakukan upaya negosiasi untuk menegaskan kembali identitas budaya mereka.

Bagi penulis, kendati penghayatan orang Mentawai di Siberut—yang sering dipandang sebagai benteng pertahanan budaya Mentawai—terhadap *sabulungan* berubah dan praktik-praktik budaya tersebut mulai terkikis, penting untuk mengulas lebih dalam lagi sumbangan tradisi tersebut terhadap lingkungan hidup. Menjaga relasi yang seimbang antara manusia dan alamnya yang pada masa lalu sarat dipengaruhi unsur-unsur supranatural dan kepentingan kelompok tertentu, tetap menjadi sumbangan yang besar bagi dunia modern saat ini. Filosofi yang terkandung dalam *sabulungan* yang penting untuk diingat adalah bahwa manusia sejak semula hadir sebagai ‘pendatang’ di hadapan alam ini, dan bukan merupakan ‘pemilik’ atasnya. Oleh karena itu, membangun rasa hormat dan

syukur terhadap alam lingkungan yang telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi kehidupan manusia merupakan semangat yang selalu relevan bagi kehidupan manusia di zaman modern ini.

Daftar Pustaka

- Coronese, Stefano. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta: Grafidian, 1986.
- Darmanto, dan Abidah B. Setyowati. *Berebut Hutan Siberut: orang Mentawai, kekuasaan, dan politik ekologi*. Cet. 1. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), UNESCO, 2012.
- Loeb, Edwin Meyer. "Mentawai Religious Cult." Dalam *University of California Publications in American Archaeology and Ethnology*, Vol. 25:185-247, plates 69-73. no. 2. Berkeley, Calif.: University of California, 1929.
- Persoon, Gerard A., ed. *The Position of Indigenous Peoples in the Management of Tropical Forests*. Tropenbos Series 23. Wageningen: Tropenbos International, 2004.
- Persoon, Gerard, dan Reimar Schefold, ed. *Pulau Siberut: pembangunan sosio-ekonomi, kebudayaan tradisional dan lingkungan hidup*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985.
- Rudito, Bambang. *Bebetel Uma Kebangkitan Orang Mentawai: Sebuah Etnografi*. Gading Publishing, 2013.
- Schefold, Reimar. "The Domestication of Culture: Nation-building and Ethnic Diversity in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 154, no. 2 (1998): 259–80.
- Tulius, Juniator. "Family Stories Oral Tradition: memories of the past, and contemporary conflicts over land in Mentawai – Indonesia." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 15, no. 1 (1 April 2013): 180. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.110>.
- ### Sumber dari Internet:
- Fadjar, Evieta. (2013, April). Mentawai Memiliki 2 Titik Ombak Terbaik Dunia. *Tempo.co*, diambil dari <https://travel.tempo.co/read/473309/mentawai-punya-dua-titik-ombak-terbaik-dunia#> Diakses pada 27 September 2017.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/23/15091911/penetapan-presiden-1965-soal-penodaan-agama-kerap-ditafsirkan-diskriminatif>. Diakses pada 14 Maret 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/11495511/mk-hak-penganut-kepercayaan-setara-dengan-pemeluk-6-agama>. Diakses pada 14 Maret 2018.
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170818/281960312863916>. Diakses pada 26 September 2017.
- Puspita, Ratna. (2018, Maret). Pendapatan Mentawai dari Pariwisata Capai Rp. 7,3 Miliar. *Republika.co.id*, diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/18/p5slc7428-pendapatan-mentawai-dari-pariwisata-capai-rp-73-miliar> di akses pada 14 September 2018.
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170818/281960312863916>. Diakses pada 26 September 2017.
- <https://sp2010.bps.go.id>. Diakses pada 28 November 2018.
- <http://www.thejakartapost.com/life/2017/10/11/by-mentawai-for-mentawai-how-community-driven-education-can-save-a-tribe.html>. Diakses pada 12 Oktober 2017.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov38xb428-pembangunan-infrastruktur-mentawai-mendesak>. Diakses pada 30 Nvember 2018.